

## Local Strongman and Political Dynasty: Political Economic Analysis of Aang Hamid Suganda in Kuningan Regency, 2003-2018

## Orang Kuat Lokal dan Dinasti Politik: Analisis Ekonomi Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan 2003-2018

**Riyana Kristono**

Universitas Jenderal Soedirman

### **Abstrak:**

Dinasti politik merupakan pewarisan kekuasaan politik di antara anggota sebuah keluarga selama beberapa generasi. Studi ini menganalisis bagaimana dinasti politik dibangun oleh local strongman di Kabupaten Kuningan. Kuningan dipilih sebagai lokus studi ini dengan alasan di wilayah tersebut dinasti politik dibangun tanpa mengalami 'perlawanan' dari warga, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta dilengkapi dengan penggunaan teori Joel S. Migdal tentang local strongman serta local bossism dari John T. Sidel. Temuannya adalah Aang Hamid Suganda (AHAS) merupakan local strongman dari kalangan pengusaha sukses sekaligus kader PDIP, parpol pemenang pemilu di Kuningan. Dukungan terhadap AHAS melambungkan rating PDIP di Kuningan, bersimbiosis terhadap kesuksesannya menjadi Bupati selama dua periode berturut-turut. Dinasti politik AHAS menunjukkan bahwa keberhasilan pewarisan kekuasaan dalam sebuah keluarga dapat dilakukan melalui efektifitas strategi politik, signifikansi pembangunan daerah, dan kuatnya pengaruh sosial yang diciptakan.

**Kata-Kata Kunci:** Dinasti Politik, Local Strongman, Aang Hamid Suganda.

### **Abstract:**

Political dynasty is the inheritance of political power among members of a family over several generations. This study analyzes how political dynasties were built by local strongmen in Kuningan Regency. Kuningan was chosen as the locus of this study on the grounds that in that region a political dynasty was built without experiencing 'resistance' from the residents, and it still continues today. This study uses a qualitative method with a case study approach and is complemented by the use of Joel S. Migdal's theory about local strongman and local bossism from John T. Sidel. The findings were that Aang Hamid Suganda (AHAS) was a local strongman from among successful entrepreneurs and a cadre of PDIP, the political party that won the election in Kuningan. Support for AHAS soared PDIP's rating in Kuningan, symbiotically with his success as Regent for two consecutive terms. The AHAS political dynasty shows that the successful inheritance of power within a family can be done through the effectiveness of political strategy, the significance of regional development, and the strong social influence created.

**Keywords:** Political Dynasty, Local Strongman, Aang Hamid Suganda.

---

### **Korespodensi:**

Riyana Kristono (riyanakristfab@gmail.com)

## Pendahuluan

**D**esentralisasi menjadi perubahan kebijakan politik paling nyata dari tumbangnya Orde Baru. Pola kekuasaan sentralistik yang bertahan selama 32 tahun berganti menjadi semangat reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Pengesahan kebijakan desentralisasi turut mengubah landasan politik hubungan pemerintah pusat-daerah serta ekonomi politik Indonesia.

Kebijakan desentralisasi, bersama dengan peraturan partai politik yang diperkenalkan pada tahun 1999, tidak hanya mengubah peta politik Indonesia tetapi juga memotivasi politisi lokal atau elit politik lokal dalam hal politik dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, politisi lokal merupakan pemain politik 'yang tersisihkan' di tingkat politik nasional. Keberadaan dan peran mereka sangat bergantung pada negara karena besarnya kekuasaan negara yang bersifat terpusat (Gaffar, 1999). Pasca berlakunya desentralisasi dan peraturan tentang partai politik, politisi lokal perlahan mulai muncul sebagai pemain kunci di tingkat politik lokal (Haryanto, 2009). Perubahan sistem politik memberikan pengaruh terhadap keberadaan dan peran politisi lokal, tidak hanya dalam konteks hubungannya dengan massa pendukung tapi juga dengan negara. Dalam usaha memperoleh maupun mempertahankan kekuasaannya, politisi lokal seolah dituntut melakukan perhitungan yang taktis serta menjaga kedekatannya dengan negara sekaligus massa pendukungnya. Kondisi ini menimbulkan persaingan pada kalangan internal elite politik lokal tersebut.

Di beberapa daerah, politisi lokal muncul dan terbentuk dari kalangan lingkungan keluarga dengan basis material yang kuat. Kemunculannya ini kemudian membentuk rangkaian dinasti politik. Kasus di Provinsi Banten misalnya, menunjukkan bahwa seorang oligarki dapat membangun basis kekuasaannya dengan mengendalikan kegiatan ekonomi. Dinasti politik keluarga Ratu Atut Choisyah yang berbentuk dinasti Octopussy, terbangun dengan memanfaatkan jaringan kekuasaan yang didirikan oleh ayahnya, Tubagus Chasan Sochib, seorang Jawara (jagoan lokal) serta memanfaatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat Banten pada Pilkada 2015 dan 2017 (Sukri, 2020). Dinasti politik keluarga tersebut tetap bertahan juga melalui strategi politik yang sangat baik. Menurut Negara Institute sebanyak 124 calon kepala daerah memiliki ikatan kekeluargaan pada Pilkada 2020, sebuah jumlah yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan pemilu kepala daerah periode 2015-2018 di mana hanya 86 calon yang terpapar politik kekerabatan (kompas.com, 2020).

Pada Pilkada 2020, dari hasil penghitungan cepat, terdapat enam pemenang yang masih mempunyai silsilah kekerabatan dengan pihak penguasa. Mereka adalah Gibran Rakabuming Raka (calon wali kota Surakarta), dan Bobby Nasution (wali kota Medan) (cnnindonesia.com, 2020). Mereka merupakan anak dan juga menantu Presiden Joko Widodo. Untuk Kota Tangerang Selatan, tiga pasangan kandidatnya mempunyai hubungan keluarga dengan elit politik lokal maupun nasional. Benyamin Dafnie dan Pilar Saga Ichsan, pasangan nomor urut 03, yang mana Pilar adalah anak calon Bupati Serang incumbent, Ratu Tatu Chasanah yang bukan lain adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sekaligus ipar Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan. Untuk pasangan calon wali dan wakil walikota nomor urut 02, ada Siti Nur Azizah – Ruhamaben. Siti Nurazizah merupakan putri Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin. Selain itu terdapat pasangan nomor urut 01, Muhamad dan Rahayu Saraswati. Saraswati sendiri merupakan keponakan Prabowo Subianto (Rahmatunnisa, 2021).

Di Kediri calon bupati nomor urut 1, Hanindhito Himawan Pramana adalah putra Pramono Anung (Sekretaris Kabinet RI periode 2015 hingga saat ini) yang berpasangan dengan Dewi Mariya Ulfa, sedangkan di Propinsi Kepulauan Riau, ada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina (istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi) (antikorupsi.org, 2020). Di Kabupaten Indragiri Hulu, calon bupati nomor urut 2 Rezita Meylani adalah istri Bupati petahana Indragiri Hulu, Yopi Arianto (gatra.com, 2021). Pola lain politik kekerabatan pada Pilkada 2020 adalah munculnya istri kepala daerah petahana (kasus Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu), adik dari petahana (kasus Kota Makassar dan Kabupaten Serang), atau keponakan (kasus Kota Tangerang Selatan serta Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) (kompas.com, 2020).

Kenawas (2020; dalam Rahmatunnisa, 2021) menemukan sebanyak 117 pemenang Pilkada dalam rentang waktu 2015-2018 merupakan 'hasil' dari politik kekerabatan. Jumlahnya melonjak jika dibandingkan dengan Pilkada 2013 yang 'hanya' berjumlah 39 saja. Kajian Negara Institute menegaskan bahwa pada Pilkada 2018, 80 (14,78%) dari 514 daerah otonom di Indonesia terindikasi ke dalam politik kekerabatan. Pada Pilkada 2018 di Jawa Barat, terdapat sepuluh calon yang memiliki jaringan/hubungan kekerabatan:

**Tabel 1. Jaringan Kekeabatan dalam Pilkada di Jawa Barat**

No	Nama	Wilayah Pilkada	Jaringan/Hubungan Keluarga
1.	Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si	Kabupaten Bandung Barat	Istri Abubakar (Bupati Bandung Barat)
2.	Ade Yasin	Kabupaten Bogor	Adik Rahmat Yasin (mantan Bupati Bogor)
3.	Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos	Kabupaten Bogor	Istri Syarif Hasan (Anggota DPR dari Dapil Jabar III)
4.	Fitri Putra Nugraha	Kabupaten Bogor	Anak Agus Utara Effendi (Bupati Bogor)
5.	Ficky Rhoma Irama	Kabupaten Bogor	Anak Rhoma Irama (Pendiri Partai Idaman)
6.	Zaenal Mutaqin	Kota Bogor	Adik Rahmat Yasin (Mantan Bupati Bogor)
7.	Hj. Anne Ratna Mustika	Kabupaten Purwakarta	Istri Dedy Mulyadi (Bupati Purwakarta)
8.	Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP, M.Si	Kota Banjar	Istri Herman Sutrisno (Walikota Banjar 2004-2013)
9.	H. Yosa Octora Santono, S.SI, M.M.	Kabupaten Kuningan	Anak pasangan Amin Santono (anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dan Yoyoh Rukiyah Amin (anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrat).
10.	Muhammad Ridho Suganda, S.H., M.SI.	Kabupaten Kuningan	Anak pasangan Aang Hamid Suganda (Bupati Kuningan dua periode; 2003-2013) dan mendiang Utje Choeriah (Bupati Kuningan periode 2013-2016)

Sumber: rumahpemilu.org, 2018

Di Kabupaten Kuningan indikasi munculnya dinasti politik dimulai pada masa kepemimpinan Bupati Aang Hamid Suganda (selanjutnya akan disebut AHAS). Ia menjabat sebagai Bupati Kuningan selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2013). Setelah masa jabatannya selesai, kepemimpinannya 'dialihkan' kepada istrinya, Utje Choeriah (Bupati Kuningan periode 2013-2016). Masa kepemimpinan Utje berjalan kurang dari 5 tahun karena ia meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung. Ridho Suganda, anak bungsu AHAS, kemudian menjadi wakil bupati untuk periode 2018-2023, dan berencana menyalonkan diri sebagai Bupati Kuningan untuk periode 2024-2029.

Politik kekerabatan di Indonesia cukup banyak menjadi tulisan. Beberapa jurnal membahas praktik politik kekerabatan di beberapa daerah seperti pada Pilkada Kabupaten Klaten, Pilkada Kabupaten Bone, atau yang menyorotinya secara umum dalam konteks nasional. Namun untuk lokus Kabupaten Kuningan, ada dua tulisan yang sangat relevan untuk menjadi bahan rujukan dan perbandingan, yaitu jurnal berjudul Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan, tulisan Dina Fadiyah, dkk dalam *Journal of Political Issue* (2022) dan tulisan Elwyn Rida Dwiwenty berjudul Politik Dinasti Aang Hamid Suganda Dalam Kontestasi Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Kuningan. Kedua tulisan tersebut menyoroti Aang Hamid Suganda dalam konteks dinasti politik.

Tulisan ini melengkapi literatur tentang dinasti politik yang sudah ada sebelumnya, di mana AHAS, local strongman di Kabupaten Kuningan, sebagai tokoh sentralnya. Meskipun memiliki tema dan kerangka berpikir yang sama dengan tulisan lainnya tentang AHAS, namun tulisan ini menawarkan data atau detail yang berbeda. Tulisan ini akan menggunakan teori Joel S. Migdal tentang Local Strongman serta Local Bossism dari John T. Sidel. Kedua teori tersebut dapat memberikan gambaran kemunculan local strongman sekaligus menjelaskan alasan kemampuan bertahannya. Bagaimana desentralisasi dapat memunculkan dan melanggengkan sebuah dinasti politik yang dibangun oleh local strongman? Pertanyaan tersebut akan coba dijawab melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Data diperoleh secara manual (buku, majalah, surat kabar, dll) dan secara online (berbagai macam situs internet, media berita online, dll).

### **Imbas Desentralisasi**

Kebijakan desentralisasi mengubah wajah politik hubungan pusat dan daerah serta ekonomi politik Indonesia. Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan, bersama dengan peraturan partai politik yang diciptakan pada tahun 1999, memberikan motivasi kepada aktor politik lokal dalam hal politik sekaligus ekonomi. Dalam salah satu bab bukunya berjudul *Desentralisasi dan Perubahan Ekonomi Politik*, Wahyu Prasetyawan menggarisbawahi tentang adanya 'insentif'. Insentif ini dapat dimaknai baik secara material (keuntungan/reward) maupun imaterial (kesempatan). Perubahan insentif memberikan dorongan bagi politisi lokal untuk menjadi pemain penting di tingkat lokal. Para politisi lokal ini lebih pragmatis. Mereka mengabaikan perbedaan ideologis dan lebih memperhitungkan keuntungan politik dan ekonomi saja. Menurut Wahyu,

keilmuan umum tentang desentralisasi atau otonomi daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pemahaman seputar lahirnya kebijakan tersebut, potensi pecahnya Indonesia, pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, munculnya oligarki di tingkat lokal, konflik etnis, dan perebutan sumber daya alam. (Prasetyawan, 2018: 37)

Winters menilai bahwa di Indonesia, dari berbagai sumber kekuatan politiknya, kekuatan material sejauh ini merupakan yang paling terpusat/kuat, serbaguna, permanen, dan paling tidak dibatasi. Kekayaan adalah yang paling kuat dan fleksibel dari semua sumber daya kekuatan untuk mempengaruhi hasil politik. Menurutnya, ketimpangan material yang ekstrem pasti menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrem (Winters, 2013: 12). Kondisi tersebut akhirnya memunculkan para oligark maupun local strongman dengan basis kekayaan yang besar. Adanya fenomena dinasti politik di tingkat lokal yang biasanya lahir dari local strongman atau oligark di daerah telah menjadi varian tersendiri dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan kekuasaannya dengan cara-cara, baik elegan ataupun kekerasan, untuk mengumpulkan keuntungan baik dari segi politik maupun ekonomi.

Setidaknya ada tiga fenomena yang terkait pembahasan dinasti politik ini (Purwaningsih, 2020). Yang pertama, keluarga Politik adalah apabila terdapat dua atau lebih keluarga yang menduduki jabatan politik. Konsep keluarga politik juga dikaji oleh Purdey, Aspinall, dan As'ad. Menurut mereka keluarga politik adalah keluarga di mana anggotanya menempati beberapa jabatan politik dalam sebuah wilayah otonom. Aspek lain dari dominasi keluarga politik ini adalah penyebaran anggota keluarga pada banyak badan politik yang strategis, legislatif ataupun eksekutif, yang tidak hanya di dalam sebuah daerah otonom semata, namun juga pada wilayah di sekitarnya (kabupaten, kota ataupun negara bagian). Perubahan dari keluarga politik menjadi dinasti politik terjadi jika kekuasaannya berhasil diperluas atau semakin menguat, namun jika kalah dalam kontestasi pilkada, kekuasaan mereka yang terampas akan coba direbut kembali (diteruskan) melalui pasangan (suami/istri) maupun kerabat lainnya (intragenerasi) atau anak/menantu (antargenerasi) (Purdey, dkk, 2016).

Selanjutnya, politik kekerabatan adalah sebuah usaha mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik dalam sebuah pemerintahan, namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan (dari keturunan maupun ikatan

perkawinan). Yang ketiga adalah dinasti politik yang merupakan sebuah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik; jumlahnya paling sedikit empat orang, serta lebih dari dua generasi.

Berdasarkan tiga fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat pada dinasti politik adalah beberapa generasi dalam satu keluarga, sedangkan pada politik kekerabatan yang terlibat hanya satu generasi saja. Selain itu pada dinasti politik warisan kekuasaan dilakukan antargenerasi, sedangkan pada politik kekerabatan penunjukan kekuasaan berdasarkan hubungan keluarga dengan mengabaikan meritokrasi. Dalam hal jangka waktu, dinasti politik seringkali berlangsung dalam periode yang lebih lama (karena terjadi pada beberapa generasi), sedangkan politik kekerabatan dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih pendek serta tidak harus berkelanjutan.

Dalam kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia ada dua bentuk dinasti politik. Pertama, *by design* yaitu dengan istri atau anak sebagai penerus kekuasaan. Kedua, *by accident* yaitu mencalonkan kerabatnya supaya dapat menggantikannya menjadi pemimpin selanjutnya, dengan tujuan mengekalkan kekuasaan di wilayah tersebut. (Wasisto dalam Fadiyah, dkk, 2022).

Doyle (2015) serta Geys dan Smith (2017) menemukan fakta, politik kekerabatan tumbuh subur saat sistem pemilu lebih bersifat *candidate-centered* ketimbang *party-centered*, dan dalam sistem pemilu yang demikian, peluang besar didapat oleh kandidat yang mempunyai afiliasi dengan keluarga atau dinasti politik. Macetnya kaderisasi membuat partai politik saat melakukan penentuan kandidat lebih mendasarkan pada faktor personal, popularitas, dan *name recognition* (kemampuan identifikasi atau kesadaran pemilih terhadap nama kandidat yang biasanya terbentuk dari hasil metode kampanye). Partai politik bersama masyarakat yang pragmatis dan permisif dengan kemunculan keluarga maupun dinasti politik, menjadi faktor kuatnya calon pemimpin daerah yang melakukan praktik politik kekerabatan.

### **Fenomena Politik Kekerabatan Aang Hamid Suganda (AHAS)**

Kecenderungan politik kekerabatan sudah terlihat pada Pilkada 2013 di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Di Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana Supardi, istri Bupati Dedi Supardi, masuk bursa pencalonan bupati untuk periode 2013-2018. Perpindahan kekuasaan dari suami kepada istri diawali oleh Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang setelah menjabat bupati dua periode berturut-turut, digantikan

oleh istrinya Anna Sophanah. (republika.co.id, 2013). Di Kabupaten Kuningan, terdapat nama Utje Suganda, istri AHAS, bupati yang telah menjabat dua periode secara beruntun 2003-2013.

Menarik mencermati sepak terjang AHAS di kancah politik lokal. Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat di tahun 1956, Sekolah Teknik Negeri tahun 1960, Sekolah Guru Pengajaran Teknik Bandung tahun 1964, IKIP (sekarang UPI Bandung) dengan mengambil Jurusan Teknik Sipil di tahun 1967, dan terakhir STIA Bagasasi Bandung tahun 2006. Sebelum menjabat sebagai Bupati Kuningan, ia adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi. Berikut profil karier AHAS (ciremainews.com, 2013):

- 1970-1997: Direktur Utama PT Waskita Jaya Purnama;
- 1978-1984: Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gapensi Kota Madya Bogor (dua periode);
- 1984-1989: Ketua Empat DPD Gapensi Jawa Barat;
- 1989-2003: Bendahara Umum DPP Gapensi (empat periode);
- 1995-1998: Ketua Yayasan Rereongan Sarpi Kota Bogor;
- 1995-1999: Ketua Tiga KONI Kotamadya Bogor;
- 1995-2003: Komisaris Utama Bank Pengkreditan Rakyat PT Laksawacana Agri Purnama, Direktur Utama PT Propindo Mulya Utama, Direktur Utama PT Propindo Sejati, dan Direktur Utama PT Catur Mas Karsa Udara;
- 1997-2003: Komisaris Utama PT Waskita Purnama;
- 1999-2003: Direktur Utama PT Propindo Mulya Agung, Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia, Manajer tim sepak bola Persija Jakarta;
- 2003-2013: Bupati Kuningan (dua periode);
- 2011-2015: Sekjen Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); dan
- 2011-2022: Ketua Kunci Bersama, terhenti dikarenakan meninggal dunia.

Selain sebagai pengusaha besar di bidang konstruksi yang mengerjakan proyek nasional dan di bidang properti, AHAS juga menjadi penanam saham terbesar pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kuningan, pemilik Rumah Sakit Jantung Hasna Medika, serta masuk di jajaran 15 orang terkaya di Kuningan (kuninganmass.com, 2019). Berdasarkan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dicantumkan dalam situs elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan AHAS pada tahun 2008 sebesar Rp. 10.724.620.550. Sedangkan pada

pelaporan di tahun 2013 (pada akhir masa jabatannya yang kedua), kekayaannya bertambah lebih-kurang sebesar Rp. 8 milyar menjadi Rp.18.721.165.000. Salah satu keterangan menyebutkan pada awal kepemimpinannya di tahun 2004, AHAS sempat melaporkan kekayaannya sebesar 50 miliar rupiah, akumulasi dari harta bergerak dan tidak bergerak. Namun ia meralatnya pada 2008 dengan mengganti besarnya menjadi 10,5 miliar rupiah saja (wartadesa2007, 2008).

Terdapat asumsi bahwa parameter keberhasilan pemilu (baik itu pilpres, pileg, maupun pilkada) adalah tingginya partisipasi pemilih dengan menggunakan hak pilih atau voter turnout. Menurut Budiardjo (2008), voter turnout adalah model partisipasi politik dalam sebuah Pemilu melalui perhitungan persentase perbandingan orang yang mempergunakan hak pilihnya dengan jumlah keseluruhan warga negara yang mempunyai hak memilih. Di dalam sistem desentralisasi, idealnya Kepala Daerah hasil pemilihan langsung mempunyai legitimasi yang kuat (Riewanto, 2007). Dengan adanya faktor partisipasi publik, maka voter turnout memiliki posisi yang menentukan karena secara politis suatu pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan memiliki dampak terhadap legitimasinya. Jika voter turnout dalam sebuah Pilkada kurang atau sangat rendah dari setengah jumlah total pemilihnya, maka dapat diartikan hasilnya kurang merepresentasikan keterwakilan masyarakat. Untuk itulah, partisipasi sangat dibutuhkan dalam memperkuat legitimasi politik sebuah pemerintahan (Arif, 2020).

Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Pilkada Banten 2015 dan 2017, voter turnout di Pilkada Kuningan 2008 juga cenderung rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan Pileg 2004 (fokuspantura.com, 2017). Pada Pilkada 2013, menurut data KPU Kabupaten Kuningan, meskipun persentase partisipasi pemilihnya naik sebesar sekitar satu persen dari ajang pilpub sebelumnya, namun warga yang tidak menggunakan hak pilihnya (295.564 atau 35,60%) berjumlah lebih dari setengah jumlah warga yang memilih (534.682 atau 64,40%) (x.com/KPUKuningan, 2013).

AHAS merupakan politisi senior PDIP dan menjadi salah satu penyokong kemenangan PDIP di Kabupaten Kuningan sejak Pemilu 1999. Ia bertransformasi dari seorang pengusaha kuat menjadi local strongman dan tokoh sentral di Kabupaten Kuningan terutama setelah pada Pemilu 2004 (dalam periode pertama masa kepemimpinannya sebagai Bupati Kuningan) berhasil mempertahankan dominasi perolehan kursi dewan legislatif untuk PDIP. Dari 45 kursi DPRD Kabupaten Kuningan, PDIP meraih 13 kursi (28,9 persen). Perolehan tersebut menggeser pengaruh dan dominasi Golkar sebagai kekuatan

politik paling kuat di masa Orde Baru. Pada periode kedua kepemimpinannya, figur AHAS semakin menguat karena pada penyelenggaraan Pemilu setahun berikutnya PDIP kembali mempertahankan statusnya sebagai partai pemenang di Kabupaten Kuningan. Begitu pula pada Pemilu 2014, PDIP kembali meraih kemenangan, mendapatkan 10 dari 50 kursi (sekitar 20 persen) (kompas.id, 2018). Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa dalam kontestasi Pemilu yang semakin ketat, PDIP masih menjadi partai politik terkuat dan terfavorit di Kuningan. Selain kinerja mesin politik PDIP yang sangat efektif, sosok dan pengaruh AHAS juga turut andil dalam menciptakan prestasi tersebut. AHAS membangun citra dirinya melalui gaya kepemimpinannya yang visioner, merakyat, dan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Ia membenahi berbagai lini kehidupan warga terutama pada sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Gaya kepemimpinan populis AHAS efektif dalam membangun personal branding dan komunikasi politik di dalam masyarakat. Karakteristik kepemimpinan populis AHAS ini dilakukan melalui kegiatan blusukan tanpa protokoler, muncul ditengah-tengah warga di wilayah terpencil Kuningan dan mendengarkan keluhan mereka. Hal tersebut semakin menguatkan kepercayaan masyarakat, terlebih konstituennya. Fenomena inilah yang menjadi salah satu alasan terbentuknya sokongan dari beberapa partai politik besar lainnya di Kuningan seperti Golkar, PAN, dan PBB. Dukungan tersebut bahkan dapat dirasakan ketika menguatnya wacana pencalonan AHAS sebagai Gubernur Jawa Barat ketika ia masih menjabat sebagai bupati (pada masa jabatan keduanya) dimana PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terang-terangan mendukungnya dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Barat tersebut (jabartoday.com, 2011). Begitu juga di tahun terakhir pada masa jabatannya yang kedua, PDIP Jawa Barat merekomendasikan AHAS ke DPP PDIP untuk jadi calon legislatif DPR RI. PDIP Jawa Barat menganggap ada dua faktor yang menjadi pertimbangan yaitu kinerja baik AHAS selama menjadi Bupati Kuningan dan keberhasilannya membangun basis massa PDIP di Kuningan yang cukup kuat (detik.com, 2013).

Setelah tidak lagi menjabat, AHAS mengajukan istrinya, Utje Choeriah, untuk maju di pemilihan bupati berikutnya. Dengan perolehan suara mencapai 44,99 persen, Utje menggantikan suaminya, menjadi Bupati Kuningan untuk periode 2013 hingga 2018 (Tribunnews.com, 2013). Namun sebelum masa jabatannya berakhir, di tahun 2016, Utje meninggal dunia dan Acep Purnama sebagai wakil bupati, menggantikannya. Setelah masa jabatannya habis ia

kembali mencalonkan diri dan akhirnya menjadi Bupati Kuningan pada Pilkada 2018 dengan menggandeng anak bungsu AHAS yaitu M. Ridho Suganda.

Mahalnya ongkos pilkada, diantaranya dengan 'membeli' partai politik sebagai kendaraan politik, biaya kampanye politik, dan usaha membujuk pemilih yang biasanya rentan menimbulkan praktek politik uang (Sahdan & Haboddin, 2009), telah menempatkan local strongman di posisi yang lebih kuat untuk memenangkan kontestasi ini. Faktor hegemoni AHAS di Kuningan diantaranya ia lahir dari masyarakat sipil dengan isu putera daerah Kuningan meskipun sebelumnya lebih berkiprah di wilayah lain (Bogor). Dengan basic pengusaha kuat dan sukses serta disokong oleh partai politik pemenang pemilu, tidak heran jika strategi komunikasi dan marketing politik AHAS berhasil membangun dinasti politik di Kuningan. Menurut Aspinall dan Berenschot (2019), dalam hal perwakilan berbagai kelompok etnis dan agama, demokrasi di Indonesia dinilai sudah berjalan baik. Namun, demokrasi masih belum representatif jika dilihat dari sisi kelas sosial, karena dominannya pengusaha dan elite ekonomi yang menjadi anggota parlemen, gubernur, hingga bupati.

Migdal memiliki tiga penilaian mengenai local strongman yang saling berkaitan yaitu (a) ia muncul dan tumbuh subur di tengah masyarakat 'mirip jaringan'. Sebuah masyarakat yang didefinisikan sebagai 'sekumpulan berbagai organisasi sosial semi mandiri' yang bercampur dengan 'kontrol sosial' yang efektif 'terpecah'. Pola kontrol sosial ini biasanya menyatu dalam pemerintahan kolonial dan para tuan tanah. Melalui struktur masyarakat jaringan tersebut local strongman mendapatkan pengaruh yang signifikan, bahkan jauh melampaui para pemimpin negara maupun birokrat-birokrat lokal yang disebut oleh Migdal sebagai 'segitiga penyesuaian', (b) local strongman melakukan kontrol sosial dengan membawa komponen-komponen penting yang disebut "strategi bertahan hidup" masyarakat setempat. Melalui kondisi tersebut ia memiliki legitimasi dan memperoleh dukungan yang kuat dari penduduk lokal, sekaligus memenuhi tuntutan dan kebutuhan pokok para pemilih atas jasa-jasa yang sudah mereka diberikan. Para sarjana yang terpengaruh oleh pemikiran Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah 'klientilisme', 'personalisme', dan 'relasi patron-klien'. Mereka juga memosisikan peran local strongman sebagai pemberi kebaikan personal bagi klien dan para pendukungnya yang miskin dan di wilayah kekuasaannya, dan (c) keberhasilan local strongman 'menguasai' sumber daya dan berbagai lembaga negara, dapat mempengaruhi sikap pemimpin negara dalam menjalankan berbagai kebijakan (Halim, 2014: 65)

Sidel yang meneliti sekaligus membandingkan fenomena bosisme (orang kuat lokal) di Thailand dan Filipina, menyebutkan bahwa perbedaan dengan yang ada di Indonesia pascatumbuhnya Soeharto adalah ciri bosisme atau local strongman ikatannya lebih luwes antara, pejabat, politisi, dan pengusaha (Hadiz, 2022). Temuan Migdal maupun Sidel, dengan kondisi sosio-politik yang sama, menyebutkan bahwa demokratisasi cara Barat telah menghadirkan oligarki, klientilisme, dan personalisme. Pada fenomena oligarki, klientilisme, dan personalisme inilah lahir orang kuat di tingkat lokal (local strongman), atau bos-bos lokal (local bossism), yang perannya dalam ranah politik maupun ekonomi masyarakat di daerah sangat berpengaruh. Berbeda dengan pandangan Migdal, Sidel melihat fenomena bossism bukanlah kelemahan negara (Sutisna, 2022). Para bos lokal tersebut justru muncul karena kekuatan negara sekaligus kemampuannya dalam memanfaatkan negara. Sidel menilai justru watak negara yang kuatlah yang kemudian dikendalikan jaringan bos tersebut. Mereka memanipulasi negara sehingga mempunyai kekuatan yang bersifat menekan masyarakat, mengatur hubungan sosial, serta menguasai sumber daya alam dan ekonomi

Sosok AHAS dinilai masih berperan penting dalam menjaga loyalitas simpatisan dan pemilih PDIP pasca menjabat sebagai bupati. Hubungan simbiosis dengan PDIP menjadikan AHAS sebagai 'orang kuat', sesuai dengan analisis Sidel bahwa bosisme di Indonesia pasca-Orde Baru terbentuk dari aliansi bersifat cair antara politisi, pengusaha, dan pejabat (Hadiz, 2022). Sosoknya masih menjadi inspirasi beberapa pengusaha kuat di Kuningan untuk terjun ke dunia politik (inilahkuningan.com, 2022). Aliansi politisi pengusaha dan pejabat pada Pilkada 2024 di Kuningan tetap kuat, bahkan mereka mencari dukungan dari parpol-parpol lain di luar PDIP sebagai partai politik pemenang Pilpres 2024 (ciremaiday.com, 2024). Di beberapa daerah lain selain Kuningan, PDIP memang memiliki kecenderungan merekrut pengusaha-pengusaha kuat untuk menjadi kadernya. Salah satu contohnya di Kota Surabaya, PDIP lebih memprioritaskan kadernya dari kalangan pengusaha untuk duduk di kursi dewan legislatif dibandingkan mereka yang bukan pengusaha (Fauziah, 2016). AHAS sebagai pengusaha sekaligus politisi dan pejabat (bupati) merupakan figur yang lebih komplit. Pengaruh AHAS yang semakin kuat, ditunjang oleh kinerjanya yang dinilai sangat baik, memudahkannya dalam menempatkan istri dan anaknya dalam jajaran elite pemerintahan Kabupaten Kuningan. Kesuksesan AHAS menjabat Bupati Kuningan selama dua periode berturut-turut menandakan ia telah menciptakan kekuasaan resmi sekaligus berhasil

menorehkan sejarah dalam pemerintahan lokal di Kuningan pascareformasi. Di samping itu AHAS juga sukses memperkuat pengaruh yang dimilikinya.

Geddes dalam *rational theory*-nya menyebutkan tiga hal yang akan dilakukan seseorang ketika berada di puncak kekuasaan eksekutifnya yaitu memastikan tetap bertahan dalam periode kepemimpinannya, menciptakan mesin atau kelompok politik pendukung yang loyal, dan membangun pemerintahan yang efektif (Savirani, 2007). Ketiga unsur dalam *rational theory* dapat dilakukan dengan baik oleh AHAS. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kuningan sanggup menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan yang efektif yaitu pelayanan pada masyarakat, regulasi, dan kontrol. Berkat kinerja dan pengaruh politiknya, AHAS mendapat predikat 'Bapak Pembangunan' sekaligus julukan "Aang Hotmix" karena prioritasnya terhadap pembangunan infrastruktur, terutama konstruksi jalan berupa jalanan mulus yang menjangkau kawasan terluar dan berbagai desa paling pelosok di Kabupaten Kuningan. Pada masa pemerintahannya, AHAS juga melakukan pembangunan puskesmas dan sarana kesehatan lain, pembangunan gedung-gedung sekolah, serta merevitalisasi 37 situ/embung (danau) dengan tujuan menjaga ketersediaan pasokan air bersih. Meski demikian AHAS tidak luput dari kasus-kasus yang mencoreng reputasinya. Salah satunya adalah peristiwa diskriminasi dan persekusi warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manis Lor (antaranews.com, 2010; bbc.com, 2010). Terlepas dari peristiwa tersebut, AHAS dianggap cukup berhasil menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terarah di Kuningan. Hal ini setidaknya dilihat dari berbagai prestasi yang diraih Kabupaten Kuningan di masa kepemimpinannya (humaskuningan.blogspot.com, 2013; kuninganoke.com, 2022; kuningankab.go.id, 2012). Berbagai capaian tersebut menjadi faktor utama bertahannya AHAS sebagai orang nomor satu di Kuningan selama dua periode. Sebagai seorang pengusaha dan politisi lokal, AHAS telah berhasil mengadopsi pola-pola kerja dalam dunia bisnis ke dalam ranah pemerintahan/politik.

### **Mesin Politik: Relawan AHAS dan AHAS Center**

Dalam sejarah politik istilah *volunteer* (sukarelawan/relawan) dikembangkan oleh M. Fr Voluntaire pada tahun 1755 (Arianto, 2014:131). Penggunaan istilah relawan oleh kaum intelektual bertujuan untuk menunjukkan prinsip partisipasi politik aktif mereka. Relawan politik bukanlah anggota partai politik, namun eksistensinya sangat berpotensi 'bergabung' dengan tim sukses dari suatu partai politik dengan alasan dapat lebih masif

memobilisasi rakyat. Relawan politik biasanya terbentuk dengan didasari oleh ideologi politik dan keyakinan yang kuat. Tujuannya tentu saja menjadikan kandidat atau partai politik yang mereka dukung memenangi pemilu sekaligus menerapkan berbagai program dan kebijakannya.

Relawan politik kerap dikaitkan dengan demokrasi partisipatoris, yaitu sebuah gagasan yang bertujuan membangun kritik dan penguatan terhadap ide dan penerapan electoral democracy pascareformasi 1998, yang idealnya memiliki pendekatan bersifat bottom-up melalui keberadaan kelompok atau komunitas warga yang kuat (strong citizen communities) (Kurniawan, 2008). Tujuannya adalah berinisiatif tanpa bergantung pada partai politik yang dinilai 'gagal' memahami dan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai konstituen. Peran relawan politik diharapkan dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan terkait kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga sesuai dengan keinginan rakyat dalam konteks kehidupan bernegara.

Walecki menilai relawan politik merupakan partai ketiga, karena meskipun bukan pelaku ataupun partai politik peserta pemilu, namun dapat mempengaruhi hasil pemilu tersebut (Maharddhika, 2019). Dikarenakan sifatnya yang non-partisan, kelompok relawan politik harus menaati peraturan tentang partisipasi masyarakat. Selain berkewajiban menjaga independensinya, kelompok relawan politik juga harus memberikan konfirmasi tentang profil organisasi, susunan pengurus, sumber pendanaan, rencana aksi dan wilayah kerja, serta alat dan metode yang digunakan dalam berbagai kegiatannya.

Beberapa aktivitas relawan politik di antaranya adalah melakukan kampanye lapangan (menyebarkan poster, pamflet, atau materi kampanye lainnya kepada publik), penggalangan dana, mengorganisasikan dan mengelola kegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap kandidat politik (debat, rapat umum, dan pertemuan kelompok pendukung), serta melakukan pengawasan pemilu (menjadi pengawas atau saksi di tempat pemungutan suara untuk mengawal proses pemilu agar tetap adil dan tidak terjadi kecurangan). Para sarjana seperti Verba, Schlozman, dan Brady menganalisis berbagai faktor pendorong partisipasi politik dan kontribusi relawan dalam proses demokrasi. Menurut mereka faktor utama pendorong partisipasi pada relawan politik adalah kepentingan politik pribadi, pengetahuan politik, dan keyakinan bahwa perbedaan dapat tercipta karena adanya partisipasi politik (Verba dkk, 1995). Meskipun fenomena tersebut merupakan temuan dari studi mereka pada masyarakat Amerika, namun sangat relevan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di wilayah negara lainnya.

Fenomena relawan politik merupakan sebuah bentuk baru demokrasi Indonesia. Di luar sistem politik formal yang ada, gerakan ini telah menjadi pendorong sebuah perubahan. Salah satu strategi pemenangan AHAS dalam Pilbup Kuningan 2008 adalah dibentuknya jaringan relawan dengan menggunakan namanya secara jelas, Relawan AHAS (Aang Hamid Suganda). Terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, di antaranya politisi partai, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, dan berbagai elemen lainnya dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Jaringan relawan ini merupakan mesin politik cadangan yang berfungsi memobilisasi pendukungnya. Pada Pilkada Kuningan 2013 AHAS kembali mengaktifkan Relawan AHAS, yang akhirnya berhasil memenangkan istrinya, Utje Choeriah Suganda, sebagai Bupati Kuningan (kuninganmass.com, 2018).

Efektivitas Relawan AHAS kembali terlihat pada Pilkada 2018 dengan berhasil memenangkan pasangan Acep Purnama – M. Ridho Suganda (anak bungsu AHAS). AHAS mengukuhkan Relawan AHAS Center meskipun sebelumnya telah dibentuk jaringan relawan bernama Ridho Lovers. Penggunaan nama Aang Hamid Suganda pada kelompok massa pendukung tersebut, seakan menunjukkan bahwa mesin politik pasangan Acep-Ridho (AR) sendiri dianggap tidak ampuh dalam meraih suara. Hal ini menandakan pula Ridho Lovers tidak sepopuler nama AHAS (dalam AHAS Center) dan kurang bisa menarik massa secara lebih efektif, sekaligus menunjukkan rasa kurang percaya diri pasangan AR dalam mengusung nama mereka sendiri pada kontestasi Pilkada 2018 tersebut. Hal ini menegaskan pula dominasi AHAS terhadap pasangan AR. Selain tentang sosok AHAS, tentu saja kekuatannya terletak pada basis materialnya. Ridho sendiri dalam penyampaian harta kekayaan, mencatatkan harta kekayaannya mencapai Rp 12,864 miliar pada tahun 2020. Bertambah sekira Rp 116,745 juta dari tahun 2019 sebesar Rp 12,747 miliar (kumparan.com, 2021). Jumlah harta kekayaan tersebut diyakini tidak lebih besar dari kekayaan yang dimiliki ayahnya.

Pada Pilkada 2024, Ridho merupakan kandidat terkuat Bupati Kuningan yang disokong oleh PDIP (inilahkuningan.com, 2024). Fenomena ini seolah menjadi pertarungan bagi warisan kekuatan dan pengaruh AHAS setelah sebelumnya Yuana Woelansari, istri Ridho Suganda yang juga pemilik BPR Raksa Wacana Agri Purnama gagal menjadi anggota DPRD Kuningan dari partai yang sama (radarkuningan.disway.id, 2024). Di lain pihak istri Acep Purnama, mantan Bupati Kuningan justru berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat juga melalui PDIP (tribunnews.com, 2024).

## Penutup

Aang Hamid Suganda (AHAS) merupakan local strongman di Kabupaten Kuningan. Faktor utama yang menjadikannya tokoh yang disegani dan dihormati berawal dari reputasinya sebagai pengusaha dengan basis kekayaan yang besar. Fenomena tersebut semakin diperkokoh oleh dukungan, sikap, dan strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik pemenang pemilu yang menggandeng AHAS menjadi kadernya. Dukungan terhadap AHAS telah melambungkan rating PDIP di Kabupaten Kuningan serta bersimbiosis terhadap kesuksesan AHAS sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut. Reputasi tersebut semakin mempermudah AHAS dalam 'membangun' politik kekerabatannya. Pengaruh AHAS yang sangat kuat memiliki peran penting dalam menjadikan istrinya sebagai suksesor dirinya dan menempatkan anaknya dalam jajaran paling elit pemerintahan Kabupaten Kuningan. Praktik politik kekerabatan maupun dinasti politik yang terus berlanjut tentu saja merusak kehidupan demokrasi. Fenomena tersebut berpengaruh pada strategi partai-partai politik dalam merekrut kandidat politik mereka. Partai politik cenderung memprioritaskan kandidat politik dengan basis kekayaan yang besar, di samping memperhitungkan sosok dan kharismanya.

## Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapatkan pendanaan dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

- Antaraneews.com. (2010). Menkopolhukam Instruksikan Jajarannya Atasi Kasus di Kuningan. antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/214008/menkopolhukam-instruksikan-jajarannya-atasi-kasus-di-kuningan> Diakses pada 21 Juni 2024
- Antikorupsi.org. (2020). Calon Bupati Kediri - Hanindhito Himawan Pramana. antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/node/87803> Diakses pada 21 Juni 2024
- Antikorupsi.org. (2020). Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau - Marlin Agustina. antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/node/87773> Diakses pada 21 Juni 2024
- Arianto, Bambang. 2014. Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2): 130-146

- Arif, Mokhammad Samsul. 2020. Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2 No. 1. [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Aspinall, Edward & Berenschot, Ward. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bbc.com. (2010). Bupati Minta Pemerintah Pusat Tegas. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/07/100730\\_ahmdiyahupdate](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/07/100730_ahmdiyahupdate) Diakses pada 21 Juni 2024
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ciremainews.com. (2013). Biografi Mantan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda. <https://www.ciremainews.com/nasional/pr-2513721607/biografi-mantan-bupati-kuningan-h-aang-hamid-suganda>. Diakses pada 4 Maret 2023
- Ciremaiday.com. (2024). Pengusaha Ini Sambangi Kantor PKS, Bahas soal Pilkada Kuningan. <https://ciremaiday.com/politik/pengusaha-ini-sambangi-kantor-pks-bahas-soal-pilkada-kuningan/>
- Ciremaiday.com. (2024). Thony Indra Gunawan Resmi Daftar Calon Bupati Kuningan di PKB dan PPP. <https://ciremaiday.com/politik/thony-indra-gunawan-resmi-daftar-calon-bupati-kuningan-di-pkb-dan-ppp/> Diakses pada 21 Juni 2024
- Cnbcindonesia.com. (2019). Makin Banyak Pengusaha Rangkap Jadi Politisi, Berbahayakah? [cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007140241-4-104956/makin-banyak-pengusaha-rangkap-jadi-politisi-berbahayakah](https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007140241-4-104956/makin-banyak-pengusaha-rangkap-jadi-politisi-berbahayakah). Diakses pada 7 Maret 2023
- Cnnindonesia.com. (2020). Quick Count 100 Persen: Bobby Nasution Menang Pilkada Medan. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201209185304-32-580174/quick-count-100-persen-bobby-nasution-menang-pilkada-medan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201209185304-32-580174/quick-count-100-persen-bobby-nasution-menang-pilkada-medan) Diakses pada 21 Juni 2024
- Doyle, D. T. et al. 2015. *Democratic Dynasties: Explaining Their Prevalence in Modern Democracies*, *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2556830
- Dwiwanty, Elwyn Rida. 2021. Politik Dinasti Aang Hamid Suganda Dalam Kontestasi Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Kuningan, <http://repository.unsoed.ac.id>

- Fadiyah, Dina, dkk. 2022. Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan, *Journal of Political Issues*, Volume 4, No.1
- Fauziah, Izzatun Nikmah. 2017. Pengusaha Dalam Pemilu Legislatif 2014 Studi Tentang: Kandidasi Para Pengusaha Di PDIP Kota Surabaya. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
- Fokuspantura.com. (2017). Harta Kekayaan Bupati Kuningan hingga Ketua DPRD Naik Selama Pandemi COVID-19. fokuspantura.com. <https://www.fokuspantura.com/hinterland/831-kpu-kuningan-butuh-30-relawan-demokrasi>. Diakses pada 10 Maret 2023
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatra.com. (2021). Pecahkan Rekor Suami, Rezita Jadi Calon Bupati Terpilih Termuda di Indonesia. *antikorupsi.org*. <https://www.gatra.com/news-513893-politik-pecahkan-rekor-suami-rezita-jadi-calon-bupati-terpilih-termuda-di-indonesia.html> Diakses pada 21 Juni 2024
- Geys, B. and Smith, D. M. 2017. Political Dynasties in Democracies: Causes, Consequences and Remaining Puzzles, *Economic Journal*, 127(605), pp. F446–F454. doi: 10.1111/eoj.12442
- Hadiz, Vedi R. 2022. *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme*, Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
- Halim, Abdul. 2014. *Politik Lokal Pola Aktor & Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung*, Yogyakarta: LP2B
- Haryanto. 2009. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 2.
- Humaskuningan.blogspot.com. (2013). Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda Terima Penghargaan Nasional. humaskuningan.blogspot.com. <https://humaskuningan.blogspot.com/2013/05/bupati-kuningan-h-aang-hamid-suganda.html> Diakses pada 21 Juni 2024
- Inilahkuningan.com. (2022). Rokhmat Ardiyan Bisa Ulang Sukses Aang Hamid Suganda Di Kuningan. inilahkuningan.com. <https://inilahkuningan.com/rokhmat-ardiyana-bisa-ulang-sukses-aang-hamid-suganda-di-kuningan/> Diakses pada 21 Juni 2024
- Inilahkuningan.com. (2024). Tinggal 2 Nama, Ridho Suganda Terkuat Cabup PDIP Kuningan 2024. inilahkuningan.com. <https://inilahkuningan.com/tinggal-2-nama-ridho-suganda-terkuat-cabup-pdip-kuningan-2024/> Diakses pada 21 Juni 2024

- Jabartoday.com. (2011). Setelah PDIP Giliran PPP Kuningan Dukung Aang Jadi Cagub Jabar. jabartoday.com <https://jabartoday.com/setelah-pdip-giliran-ppp-kuningan-dukung-aang-jadi-cagub-jabar/> Diakses pada 21 Juni 2024
- Jawapos.com. (2020). Kuasa Politik Kekerabatan. jawapos.com. <https://www.jawapos.com/opini/14/12/2020/kuasa-politik-kekerabatan/> Diakses pada 4 Maret 2023
- Kompas.com. (2020). Istri Petahana Maju Jadi Calon Kepala Daerah Di Pilkada 2020. kompas.com <https://pemilu.kompas.com/rumahpilkada/read/2020/12/06/06160011/29-istri-petahana-maju-jadi-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2020> Diakses pada 21 Juni 2024
- Kompas.com. (2020). Riset Negara Institute: 124 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Terkait Dinasti Politik. kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/17280341/riset-negara-institute-124-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2020-terkait>. Diakses pada 21 Juni 2024
- Kompas.id. (2018). Jejak Trah Suganda Di Balik Pilbup Kuningan. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2018/09/29/jejak-trah-suganda-di-balik-pilbup-kuningan> Diakses pada 21 Juni 2024
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (n.d.). ELHKPN - LHKPN: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Retrieved June 24, 2024, from [https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check\\_search\\_announ#announ](https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ)
- KPU Kuningan. (n.d.). KPU Kuningan on Twitter: "Hasil pleno penetapan calon terpilih DPRD Kab. Kuningan: [link to tweet]. Twitter. Retrieved June 24, 2024, from <https://x.com/KPUKuningan/status/381032264529756160>
- Kumparan.com. (2021). Harta Kekayaan Bupati Kuningan hingga Ketua DPRD Naik Selama Pandemi COVID-19. kumparan.com. <https://kumparan.com/ciremaidtoday/harta-kekayaan-bupati-kuningan-hingga-ketua-dprd-naik-selama-pandemi-covid-19-1waMAqvBilG/full>. Diakses pada 7 Maret 2023
- Kuningankab.go.id. (2012). Bupati Kuningan Terima Penghargaan Dari LIPI. kuningankab.go.id. <https://kuningankab.go.id/home/bupati-kuningan-terima-penghargaan-dari-lipi/> Diakses pada 21 Juni 2024
- Kuninganmass.com. (2018). Aang Hamid Suganda Akhirnya Turun Gunung. kuninganmass.com. <https://kuninganmass.com/aang-hamid-suganda-akhirnya-turun-gunung/> Diakses pada 21 Juni 2024

- Kuninganmass.com. (2018). Kritik Terhadap Pernyataan Edo Soal Dinasti Politik. [kuninganmass.com. https://kuninganmass.com/kritik-terhadap-pernyataan-edo-soal-dinasti-politik/](https://kuninganmass.com/kritik-terhadap-pernyataan-edo-soal-dinasti-politik/). Diakses pada 2 Maret 2023
- Kuninganmass.com. (2019). Siapakah 15 Orang Terkaya di Kuningan? [kuninganmass.com.https://kuninganmass.com/siapakah-15-orang-terkaya-di-kuningan/](https://kuninganmass.com/siapakah-15-orang-terkaya-di-kuningan/). Diakses pada 2 Maret 2023
- Kuninganoke.com. (2022). Mengingat Prestasi H Aang Hamid Ketika Menjadi Bupati Kuningan, Ini Raihannya. [kuninganoke.com https://www.kuninganoke.com/2022/06/mengingat-prestasi-h-aang-hamid-ketika.html](https://www.kuninganoke.com/2022/06/mengingat-prestasi-h-aang-hamid-ketika.html) Diakses pada 21 Juni 2024
- Kurniawan, Bachtiar. 2008. Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga. Jakarta: Jakarta; ELSAM.
- Maharddhika. 2019. (Re)Definisi Relawan Politik, <https://perludem.org/2016/04/19/redefinisi-relawan-politik-oleh-maharddhika/>
- Migdal, Joel S. 2001. *State in Society: Studying How States And Societies Transform And Constitute One Another*. Cambridge, UK: The Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Prasetyawan, Wahyu. 2018. *Business and Politics in Decentralizing Indonesia, 1998-2004*, NUS Press; Kyoto University Press
- Purdey, J., Aspinall, E. and As'ad, M. U. 2016. Understanding Family Politics, *South East Asia Research*, 24(3), pp. 420–435. doi:10.1177/0967828X16659571.
- Purwaningsih, Dr. Titin. 2020. Politik Dinasti di Indonesia: Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi. <https://ip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Seminar-Politik-Dinasti.pdf>
- Radarkuningan.disway.id. (2024). Istri Mantan Wakil Bupati Kuningan Gagal Terpilih di Pileg, Ini Nama Anggota Dewan Baru dari PDIP. [radarkuningan.disway.id. https://radarkuningan.disway.id/read/661182/istri-mantan-wakil-bupati-kuningan-gagal-terpilih-di-pileg-ini-nama-anggota-dewan-baru-dari-pdip](https://radarkuningan.disway.id/read/661182/istri-mantan-wakil-bupati-kuningan-gagal-terpilih-di-pileg-ini-nama-anggota-dewan-baru-dari-pdip) Diakses pada 21 Juni 2024
- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2021. Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Academia Praja* Volume 4 Nomor 2
- Republika.co.id. (2013). Wilayah Cirebon Menuju Politik Dinasti. [republika.co.id https://www.republika.co.id/berita/mn5itx/wilayah-cirebon-menuju-politik-dinasti](https://www.republika.co.id/berita/mn5itx/wilayah-cirebon-menuju-politik-dinasti). Diakses pada 10 Maret 2023

- Riewanto, A. 2007. Mencermati Kinerja Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung Dalam Mengendalikan Pemerintah Daerah & Menjamin Kesejahteraan Rakyat (Upaya Mencari Sebab Buruknya Kinerja dan Tawaran Solusi). (32), 1–28.
- Rumahpemilu.org. (2018). Sengkarut Politik Kekerabatan Pada Pilkada 2018 Di Daerah Jawa Barat. rumahpemilu.org. <https://rumahpemilu.org/sengkarut-politik-kekerabatan-pada-pilkada-2018-di-daerah-jawa-barat/> Diakses pada 21 Juni 2024
- Sahdan, Gregorius & Muhtar Haboddin (ed), 2009. Evaluasi Kritis Pilkada di Indonesia, Yogyakarta: IPD Press dan KAS-Jakarta
- Sukri, Mhd Alfahjri. 2020. Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik, dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat, JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Vol 10, No. 2
- Sutisna, Agus. 2022. Local Strongman, Local Bossism, dan Fenomena Uncivilitas (Kasus Jawara di Banten), [https://www.academia.edu/20220261/Local\\_Strongman\\_Local\\_Bossism\\_dan\\_Fenomena\\_Uncivilitas\\_Kasus\\_Jawara\\_di\\_Banten](https://www.academia.edu/20220261/Local_Strongman_Local_Bossism_dan_Fenomena_Uncivilitas_Kasus_Jawara_di_Banten)
- Tribunnews.com. (2022). Muncul Relawan ‘Garda’ Untuk Pilkada Kuningan 2024, Wabup Ridho Ungkap Begini. Tribunnews.com <https://cirebon.tribunnews.com/2022/08/08/muncul-relawan-gardauntuk-pilkada-kuningan-2024-wabup-ridho-ungkap-begini>. Diakses pada 15 Maret 2023
- Tribunnews.com. (2024). Istri Mantan Bupati Kuningan Raih Suara Terbanyak untuk DPRD Provinsi, Begini Kata Acep Purnama. tribunnews.com. <https://jabar.tribunnews.com/2024/02/27/istri-mantan-bupati-kuningan-raih-suara-terbanyak-untuk-dprd-provinsi-begini-kata-acep-purnama> Diakses pada 21 Juni 2024
- Verba, Sidney., Schlozman, Kay Lehman., Brady, Henry E. 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press
- Winters, Jeffrey A. 2013. Oligarchy and Democracy in Indonesia. Southeast Asia Program Publications at Cornell University